ANALISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA ERA COVID 19 YANG MEMICU PROTEKSIONISME PERDAGANGAN

Daniatus Sholihah_086

Agribusiness Study Program, Faculty Of Agriculture University Of Trunojoyo Madura

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seluruh bangsa telah dilumpuhkan oleh pandemi Covid-19, termasuk Indonesia, dimana pandemi tersebut telah membawa perekonomian negara ke jurang resesi. Walaupun secara umum tidak setajam kemerosotan ekonomi negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang sangat bergantung pada mata uang internasional, perekonomian Indonesia lebih bersifat homegrown di mana kebutuhan bangsa lebih dipenuhi oleh barang-barang negaranya sendiri daripada oleh impor dan komoditas barang dagangan. Volume perdagangan Indonesia berfluktuasi setiap tahun selama sepuluh tahun terakhir. Wabah Covid-19 global telah mempersulit negara-negara di seluruh dunia untuk mengantisipasi dan menghindari wabah yang disebabkan oleh wabah Wuhan, China. Bahkan lembaga kesehatan dunia kekurangan staf akibat penyebarannya yang cepat dan meluas; akibatnya, negara-negara mencari sendiri rute yang aman dan berusaha untuk memagari segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan mereka terhadap peluang melarikan diri. dari wilayahnya, termasuk wilayah moneter esensial. Jiwa ini pada umumnya akan bergerak menuju proteksionisme, di tengah-tengah multilateralisme yang melemahkan menunjuk ke arah mengatasi masalah di seluruh dunia. Studi ini akan mencoba mencari tahu seberapa besar pengaruh virus Corona terhadap perkembangan proteksionisme di negara-negara di planet ini. Fakta bahwa China melakukan aktivitas ekspor terbesar dunia selama pandemi COVID-19 mendukung asumsi yang disebutkan di atas bahwa pandemi tersebut telah menimbulkan ancaman berat bagi ekonomi global, khususnya dalam hal pariwisata, perdagangan, dan investasi (Yang & Ren, 2020).

Tentu saja, ini menjadi pukulan telak bagi China karena dalam beberapa bulan ekonomi di sana merosot. Meskipun China dikenal sebagai goliat keuangan dunia, pada saat itu pemerintah lokal memusatkan perhatian pada kesejahteraan rakyat utamanya sehingga mereka dapat menghentikan aktivitas ekonomi di sana untuk beberapa waktu dan itu efektif. Karena Covid-19 berdampak negatif pada ekonomi banyak negara di dunia, banyak negara di dunia menuntut kompensasi dan mengaitkan wabah itu dengan China sejak awal. Selain itu, sejumlah negara menerapkan langkah-langkah untuk membatasi akses wisatawan Tiongkok ke perbatasan mereka. Bahkan hubungan politik China dengan Amerika semakin menghangat. Pertanyaan "Bagaimana Ekonomi Politik Tiongkok di masa depan setelah Covid-19" muncul dari penjelasan sebelumnya. Perkembangan keuangan dunia pada pertengahan tahun 2020 mulai memberikan indikasi penurunan, diawali dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, bahkan di negara-negara berkembang. Kondisi saat ini diperparah dengan pandemi virus Corona yang melanda hampir semua negara di

dunia, World Exchange Association (WTO) mencatat bahwa 80 negara telah melakukan pembatasan pengiriman.

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan darurat kesejahteraan global dan memicu legislator di setiap negara untuk meningkatkan pedoman keselamatan publik dan menerapkan berbagai strategi baru. Di awal pandemi, strategi ini dimulai dengan melakukan sistem lockdown, seperti menutup organisasi, melarang bepergian, melakukan pemindahan fisik/sosial, dan menutup batasan publik. Secara khusus, otoritas publik juga telah membuat perubahan pada aturan kebersihan untuk penanganan makanan sebagaimana ditentukan dalam Worldwide Sanitation Drive, Safe Quality Food, dan Brand Notoriety Consistence. Aturan ini dibuat untuk memastikan inisiatif jarak sosial dan protokol kesehatan COVID-19 diikuti oleh semua orang dalam rantai pasokan pangan global, mulai dari produksi hingga distribusi hingga konsumsi.

Dari sekian banyak pedoman yang telah diatur, pembatasan dan larangan terhadap bahan pangan tukar sangat mungkin menjadi pengaturan yang paling penting dan peka, karena 3 (tiga) hal. Pertama, pemetaan dampak yang terarah pada masing-masing pihak diperlukan karena industri makanan terdiri dari banyak pelaku dengan jaringan proses yang rumit. [Lihat Gambar 1] Kedua, karena sistem pangan global bernilai tambahan $8 triliun, atau kira-kira 10% dari PDB global, peraturan perdagangan pangan akan berdampak signifikan pada masa depan ekonomi global. Terakhir, kesejahteraan menjadi faktor yang sangat penting karena lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia sangat bergantung pada ketahanan pangan dalam negeri melalui perdagangan internasional.

1.1.RUMUSAN MASALAH

2. Bagaimana Dampak Pandemi Covid 19 pada perdagangan internasional
3. Mengapa pemerintah perlu melakukan proteksionisme terhadap perdagangan internasional?
4. apakah kebijakan proteksionisme masih kondusif untuk perdagangan internasional saat pandemi covid 19?

1.2. TUJUAN

1. Untuk mengetahui apa saja dampak Covid 19 terhadap perdagangan internasional
2. Dan tujuan yang kedua untuk mengetahui Mengapa pemerintah perlu melakukan proteksionisme terhadap perdagangan internasional
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan proteksionisme masih kondusif untuk perdagangan internasional saat pandemi covid 19

2. TINJAUAN PUSTKA

2.1. Teori Relevan

Hipotesis Heckscher-Ohlin secara implikasi masuk akal bahwa suatu negara akan bertukar dengan negara lain dengan asumsi negara tersebut memiliki berbagai preferensi yang dipisahkan oleh kontras dalam keadaan moneter negara-negara yang bertukar, misalnya, negara-negara yang diciptakan akan bertukar dengan non- negara industri. Wood (1994) menyelidiki episode ini dengan membandingkan negara-negara maju dan

agraris berdasarkan kemampuan produksi yang dipertukarkan dan menemukan bahwa negara-negara maju memperdagangkan barang-barang yang lebih kompleks (berkonsentrasi modal) karena fakta bahwa negara-negara maju memiliki aset modal yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan negara-negara industri. . Negara-negara berkembang biasanya hanya memperdagangkan produk mentah atau bahan alam ciptaan (pekerjaan terkonsentrasi) ke negara-negara berkembang karena mereka memiliki sumber daya kerja yang melimpah.

Pelaksanaan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) tahap ketiga dari tahun 1979 hingga 1984 menandai dimulainya perdagangan internasional Indonesia pada tahun 1980-an. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1986, yang menetapkan bahwa Perseroan Terbatas (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) didorong untuk mendapatkan fasilitas di bidang impor dan ekspor dengan memberikan fasilitas di bidang ini kepada industri strategis tertentu. perusahaan.

2.2. Konsep Konsep Pemikiran

Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith mendekati masalah perdagangan internasional ekspor dan impor dalam ekonomi tersebut dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki instrumen sendiri dalam mengurus masalah ini, antara lain: a. Kontras yang sah. Penalaran Abu 'Ubaid al-Qasim memiliki kerangka dalam pandangan hukum Islam yang bergantung pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan kemungkinan Adam Smith memiliki kerangka dalam pandangan hukum positif yang relevan. Zakat merupakan salah satu dari beberapa sistem transaksional dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim yang memperhatikan hukum Islam.

B. Variasi dalam Transaksi Kontras dalam gagasan produk dan impor dalam pertukaran global Pemikiran Adam Smith dan Abu 'Ubaid al-Qasim tentang aturan tersembunyi juga menghasilkan kontras pada setiap kerangka yang digunakan, misalnya tentang pertukaran. Menurut Abu 'Ubaid al-Qasim, seseorang akan diizinkan untuk melakukan pertukaran perdagangan jika jenis tenaga kerja dan produk yang diselesaikan adalah bisnis yang sah dan besar. Sedangkan menurut Adam Smith, seseorang dapat diperbolehkan melakukan jual beli jika usahanya diperbolehkan oleh hukum positif. Organisasi yang belum halal dianggap oleh peraturan tertentu di Indonesia bagaimanapun juga akan diakui dalam mengajukan pertukaran.

C. Perbedaan orientasi Arah yang ada dalam pertimbangan Adam Smith tentang gagasan komoditas dan impor dalam pertukaran dunia hanyalah keuntungan terletak. Dalam renungan Abu 'Ubaid al-Qasim tentang gagasan impor dan ekspor dalam perdagangan internasional, sebagai tambahan berfokus pada profit, ia juga mempertimbangkan kesejahteraan dan kepuasan akhirat.

D. Pemecahan Tarif 94 Millah Vol. dan Pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim XVII, No. 1, Agustus 2017 Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fakhri Adam Smith juga unik. Dalam perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim, beliau menerapkan cara bagi hasil pajak yang sangat besar bagi umat Islam sebesar 2,5%, Guru Dhimmi 5%, dan Kafir Harbi 10%. Bebas lalu lintas antar negara tanpa hambatan bea atau non-retribusi.

e. Pengelolaan. Sistem kontrol inilah yang membedakan Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith dalam konsep ekspor dan impor dalam perdagangan internasional dalam hal pengawasan. Dalam pandangan Abu 'Ubaid al-Qasim, ia tetap berada di bawah pengelolaan negara, misalnya strategi yang dilakukan, sedangkan dalam pandangan Adam Smith, hubungan negara dalam pertukaran dibatasi bahkan tanpa impedansi otoritas publik dalam perkembangan pertukaran.

2.3. Variabel dan Indikator yang Relevan

Menurut Barrington-Leigh & Escande (2017), peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu negara merupakan indikator keberhasilan dalam proses pembangunan melalui pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh para ahli perencanaan ekonomi dan pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan pembangunan (Halid & Yapanto, 2021). Karena tanda-tanda kemajuan suatu negara yang ditaksir secara kuantitatif secara finansial, misalnya, pembangunan moneter dirasa belum bisa memastikan derajat bantuan sosial pemerintah (Wibowo, 2016). Secara hipotetis dan beberapa investigasi eksperimental telah meneliti hubungan antara pertukaran di seluruh dunia dan pergantian peristiwa manusia. dimulai dengan kerangka konseptual yang disajikan Laporan Pembangunan Manusia Asia Pasifik (UNDP, 2006) untuk hubungan antara perdagangan dan pembangunan manusia. Sesuai sistem ini, tanda-tanda tingkat pembangunan dan konstruksi moneter telah diubah menjadi pertukaran melalui modal dan kerja suatu negara. Pekerjaan yang berbakat lebih dihargai daripada pekerjaan yang tidak kompeten berdasarkan profesinya. Hal ini membutuhkan otoritas pembuat kebijakan selain kompetensi dan keterampilan yang tinggi. Sehingga pada akhirnya kemajuan manusia juga dapat secara langsung mempengaruhi pola perekonomian, laju pembangunan, dan perdagangan. sebagai pertukaran memengaruhi daftar perbaikan manusia (Jawaid dan Waheed, 2017).

Selain itu, keterbukaan ekonomi dianggap mendorong ekspansi ekonomi (Kong, Peng, Ni, Jiang & Wang, 2021). Nowbutsing (2014) mengatakan bahwa receptiveness merupakan cara untuk memajukan pembangunan melalui karya inovatif serta akses pasar yang lebih luas. Beberapa asumsi sehubungan dengan transparansi keuangan dan file perbaikan manusia telah memberikan banyak gambaran tentang keuntungan yang bisa didapat nantinya, keuntungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan sifat SDM homegrown. Menurut Suri, Boozer, Ranis, dan Stewart (2011), peningkatan pembangunan manusia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan akan mendorong pembangunan manusia sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Penilaian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembangunan moneter dan pergantian peristiwa manusia, sehingga pembangunan tanpa pengembangan lebih lanjut perbaikan manusia tidak dapat membuat keseimbangan yang dapat dikelola (Lumbantoruan dan Hidayat, 2013).

2.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Gorg and Scenic Route (2001) dan Saggi (2000) berpendapat bahwa banyak penelitian telah dilakukan untuk mengukur eksternalitas pertukaran internasional dan spekulasi asing, tetapi banyak yang bertentangan dengan hasil eksplorasi. Iyer, Krisna G, et al (2005) memahami potensi pembenaran di balik ketidakjelasan hasil eksperimen adalah bahwa ada perbedaan antara eksternalitas inovatif dan eksternalitas produktivitas yang terkait dengan pertukaran dunia dan arus FDI. Eksternalitas teknologi, yang meningkatkan nilai kemampuan teknologi ekonomi, dan eksternalitas efisiensi, yang meningkatkan kegunaan sumber daya yang ada, termasuk teknologi, adalah dua hal yang membedakannya. Mengenali dua jenis eksternalitas sangat penting, untuk memperkirakan eksternalitas serta untuk memahami keadaan yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan pertukaran global dan aliran FDI. Vernon (1996) dan Caverns (1974) berbagi penilaian bahwa kehadiran organisasi global di negara-negara tertentu lebih berguna daripada organisasi lokal yang mengambil bagian dalam bidang serupa dan secara tegas mempengaruhi presentasi organisasi lokal. Menurut Blomstrom dan Kokko (1998), perusahaan multinasional sering dianggap sebagai sumber utama difusi teknologi dan pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah karena perdagangan internasional dan investasi asing. Dengan demikian, pertukaran global dan spekulasi asing dianggap sebagai sumber perpindahan informasi, eksekusi dan inovasi, terutama dari negara industri ke negara berkembang..

Inilah yang disebut eksternalitas positif dari investasi asing dan perdagangan internasional. Secara umum, G, et al, (2005) memahami bahwa persaingan asing suatu negara melalui pertukaran di seluruh dunia atau aliran modal dipandang sebagai pemicu persaingan. Efisiensi Ekonomi Negara-Negara ASEAN, Perdagangan Internasional, dan Investasi Asing 263 Ukuran perusahaan asing dapat menciptakan kekuatan monopoli di negara tuan rumah, yang akan mengurangi jumlah pesaing domestik dan juga mengurangi produksi hulu dan hilir domestik. Misalnya, lakukan investigasi kontekstual terhadap pemrograman Norton AntiVirus dari Sysmantec di pasar di Cina. Biaya produk disajikan sebesar 59 yuan untuk setiap pasangan, sedangkan biaya biasa adalah 280 yuan. Penawaran waktu terbatas ini mengurangi sebagian besar klien dan pada akhirnya jumlah organisasi lokal yang menciptakan program anti-virus yang serupa berkurang. Peristiwa ini sangat relevan dengan kenyataan karena dalam beberapa analisis kontekstual komparatif, hal ini penting untuk menarik perusahaan global yang memiliki dominasi dalam inovasi, namun juga memiliki kekuatan pasar yang luar biasa pada saat yang bersamaan. Semua hal dipertimbangkan, modal akan masuk dan keluar secara efektif dalam ekonomi terbuka. Jika arus keluar modal yang signifikan menyebabkan penurunan kinerja sektor ekonomi berbasis industri dan peningkatan pengangguran, efisiensi dapat terganggu.

3. **Pendekatan Atau Metode**

Dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok-pokok yang dibahas, pendekatan ini menggunakan metode sastra. Riset harian dan artikel pendukung merupakan data pemilu yang dikumpulkan peneliti. Teknik survei menggunakan metode logis yang informatif, khususnya memahami dan menggabungkan pemikiran-pemikiran penting yang sesuai dengan fokus yang diperiksa. Sejak saat itu, sajikan secara mendasar melalui sumber tulisan penting atau sub-par yang terkait dengan topik.

4. **Pembahasan**

Dampak Pandemi Covid 19 pada perdagangan internasional

Wajar saja, Indonesia juga terguncang dengan cepatnya penyebaran virus akibat regulasi yang membatasi dan melarang perdagangan internasional, seperti ekspor barang ke luar negeri (ekspor) dan impor barang ke luar negeri (impor). Keadaan Indonesia yang mengandalkan pertukaran dua sisi, terutama dengan organisasi di China, terhambat oleh pertukaran di seluruh dunia (Pramudita dan Yucha, 2020). Pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi membawa kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke sektor kesehatan, ekonomi, dan perdagangan internasional. Sebagian besar ekonomi global telah ditutup sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh masing-masing negara untuk mencegah penyebaran penyakit, yang mengakibatkan penurunan penawaran dan permintaan pasar yang signifikan. Kebutuhan akan hal-hal medis, seperti Alat Pertahanan Diri (APD), obat-obatan, dan barang-barang kesehatan lainnya yang penting untuk memerangi pandemi virus Corona, telah melonjak di hampir setiap negara di dunia. Dengan demikian, telah terjadi kejutan besar terhadap minat dunia terhadap produk klinis karena semua negara membutuhkan produk serupa untuk melawan pandemi virus Corona.

Namun, semua negara bergantung pada rantai nilai global dan perdagangan internasional, khususnya untuk perolehan pasokan medis, yang pada dasarnya merupakan salah satu tujuan kerjasama perdagangan internasional untuk memenuhi permintaan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri (Effendi et al., 2020).). Selain itu, Carbaugh menyatakan dalam bukunya tahun 2019 bahwa tidak ada negara yang tidak terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua bagian kehidupan publik harus bergantung pada negara yang berbeda. Dalam situasi EXERO, Volume 05, No. 01, Mei 2022 halaman 82 - 111 84 Pandemi virus Corona, kondisi pertukaran global telah diperburuk oleh pilihan negara untuk memboikot dan membatasi produk untuk mengatasi kekurangan stok di negara mereka masing-masing. Karena pandemi COVID-19, sejauh ini sekitar 80 negara telah melarang atau membatasi ekspor, termasuk 46 anggota WTO (72 jika masing-masing negara anggota UE dihitung) dan delapan anggota non-WTO.

Mengapa pemerintah perlu melakukan proteksionisme terhadap perdagangan internasional?

Krisis keuangan global dan meningkatnya proteksionisme, terutama di negara maju, menghantam perdagangan bebas barang dan jasa, yang sejauh ini telah menggerakkan ekonomi global (Dollar, 2020; The Financial specialist, 2022). Proteksionisme adalah strategi pembatasan perdagangan, seperti pemboikotan komoditas sementara,

peningkatan tarif bea masuk atas barang impor, pembatasan bagian impor, dan normalisasi barang yang bertujuan untuk mengurangi persaingan dan melindungi masalah pengusaha lokal dari persaingan impor. Bersamaan dengan itu, panduan kekuatan perdagangan dunia berkembang. AS menurunkan impor minyak dan gas, dan China juga mengurangi impor aset reguler karena perkembangan moneternya melambat. Dunia perdagangan global memasuki periode "perlambatan", atau perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi di mana-mana, sebagai akibat dari dua kekuatan global yang sama-sama mengurangi impor. Meskipun FDI terkait erat dengan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, perdagangan global dan investasi asing langsung (FDI) belum kembali ke level sebelum COVID-19. Semakin tinggi dukungan FDI yang masuk ke suatu negara, maka semakin mendorong pergerakan keuangan negara tersebut. Selama pandemi, banyak negara mengalami penurunan perkembangan cadangan FDI. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), aliran FDI telah menurun sebesar 35% pada tahun 2020 saja (The Economist, 2022). Virus COVID-19 juga berdampak pada setiap sektor ekonomi global dan memperkenalkan hambatan baru yang sebelumnya tidak pernah terdengar pada perdagangan internasional. Lockdown dan Beban Keterbatasan 14 Latihan Daerah (PPKM) membelenggu perkembangan individu dan produk di berbagai negara. Permintaan turun, toko tutup, organisasi gagal, dan ribuan pekerja diberhentikan. Secara umum, ekonomi dunia berkontraksi dan mengalami penurunan sebesar 3,5% pada tahun 2020. Secara terpisah, guncangan yang dialami oleh negara-negara tertentu lebih buruk daripada yang lain (The Financial Analyst, 2022). Industri jasa juga sangat terpengaruh (Dickinson & Zemaityte, 2021). Karena pembatasan perjalanan dan pembatasan pertemuan tatap muka, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan bahwa ekspor layanan komersial akan turun 20% pada tahun 2020. Pesawat juga dilarang terbang hingga pendapatan industri perjalanan benar-benar turun dan hanya bergantung pada membayar dari penginapan dan restoran dengan nilai yang kecil selama pandemi. Terlihat, industri kunjungan dan perjalanan turun hingga 63%. Banyak siswa internasional yang keluar dari universitas sebagai akibat dari penguncian di negara asal mereka. Industri kreatif terkatung-katung karena bergantung pada pertunjukan langsung. Area ekspresi pertunjukan dinilai telah kehilangan 90% pendapatannya dengan area musik mencatat kejatuhan utama selama tahun 2020 (Analis Pasar, 2022).

apakah kebijakan proteksionisme masih kondusif untuk perdagangan internasional saat pandemi covid 19

Kasus penyakit Covid di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus maupun kematian. Hingga Selasa, 12/5/2020, laman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Covid19.go.id melaporkan 14.265 kasus, dengan total 2.881 pasien sembuh dan 991 korban meninggal dunia. Bukan hanya itu, pandemi juga membawa perubahan pada berbagai aktivitas usaha bisnis atau transportasi. Oleh karena itu, para pemerintah melaksanakan perjanjian kegiatan transportasi untuk menekan dan mencegah persebaran Covid. Namun dalam jangka

panjang, setelah standar lama terjadi, otoritas publik justru memaksakan prinsip-prinsip yang tidak terduga dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan selama ini. Berikutnya adalah garis besar dari 3 strategi pemerintah yang dipertanyakan:

1. Ojek yang beroperasi secara online tidak bisa mengangkut penumpang. Salah satu upaya paksa yang dilakukan otoritas publik untuk mencegah penularan Covid adalah dengan cara Pembatasan Sosial Lingkup Besar .pertama , Pembatasan Sosial Lingkup Besar dilakukan di wilayah DKI Jakarta yang memiliki kasus Covid terbanyak di Indonesia. Efek dari sanksi PSBB adalah adanya pembatasan ojek berbasis internet bagi pemudik pada tanggal 10 April 2020. Hal itu berada dalam pasal 18 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 pasal 6. Pasal itu hanya menyebutkan penggunaan angkutan barang roda dua berbasis aplikasi. Sementara itu, pada 14 April 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kembali taksi pesiar berbasis web untuk melayani pemudik di daerah yang menerapkan PSBB. Aturan terkait pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran virus Corona tertuang dalam Pedoman Imam Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.

2.Kementerian Perhubungan juga memberlakukan larangan mudik mulai 24 April hingga 31 Mei 2020 selama pandemi corona. Larangan ini dimulai pada 7 Mei 2020. Semua metode transportasi darat bergantung pada standar ini.

Terlebih lagi, pelanggar dikenakan sanksi berupa peringatan dan penyembunyian kendaraan yang berusaha keluar dari wilayah PSBB seperti Jabodetabek atau denda Rp 100 juta. Itu tidak berlangsung lama; pada tanggal 7 Mei 2020, aturan tersebut diubah dan diatur agar semua moda transportasi dapat tetap beroperasi dengan beberapa batasan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengungkapkan, pendekatan ini direncanakan agar perekonomian daerah tetap berjalan.

3. Spesialis publik mengizinkan penghuni di bawah 45 tahun untuk kembali berolahraga. Pengaturan otoritas publik untuk mengizinkan individu di bawah 45 tahun untuk melanjutkan aktivitas mereka juga merupakan keputusan yang masuk akal. Hal itu disampaikan Doni Monardo, Ketua Tim Peningkatan Kecepatan Penanganan Virus Corona, Senin (5/11/2020) melalui video meeting.

Bapak presiden Jokowi dodo memohon agar seluruh rakyat untuk lebih waspada terhadap penularan virus Covid, yaitu dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan . Telecommuting, merenung dari rumah, dan mencintai dari rumah adalah latihan yang dimaksud. Jokowi mengklaim langkah ini penting untuk memperluas kemampuan penanganan virus Corona. Tapi, hal ini berdampak pada berbagai asosiasi yang mengalami musibah dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Arif Maulana, Ketua LBH Jakarta, mengungkapkan Mengenai Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, Pengadaan buruh menyatakan bahwa badan publik harus berkontribusi sedapat-dapatnya untuk mencegah terjadinya pemotongan. Tidak hanya spesialis terbuka, pengusaha dan buruh juga harus berupaya mencegah pemotongan. Bagaimanapun, prosedur yang diambil oleh spesialis publik harus dapat memberikan keuntungan bagi daerah dan tidak menjadi beban bagi pengusaha juga yang dapat dilakukan sebagai pengaturan untuk bekerja pada perekonomian.

Kesimpulan

Dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua negara, khususnya perdagangan internasional. sehingga berdampak signifikan tidak hanya pada perekonomian tetapi juga pada semua bidang lainnya, khususnya perekonomian. Hal itu dilakukan dengan jeda dalam perkembangan keuangan akibat pandemi virus Corona. Baik permintaan domestik yang melemah maupun kondisi eksternal yang memburuk berkontribusi pada penundaan ini. Pandemi virus Corona akan berdampak buruk pada indonesia dan ekonomi dunia tahun ini, karena terjadi serentak dengan penurunan biaya peralatan dan gejolak pasar moneter.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, E. (2019). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen, 9(1), 17–26. https://doi.org/10.34010/jurisma.v9i1.1414

A. J. H. Irawan, "Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi Dan Revitalisasi Multilateralisme", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 0, no. 0, pp. 47 –52, 2020.

Zamroni Salim, dkk, 2020. Policy Paper: KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI GLOBAL DALAM MASA NEW NORMAL COVID-19: Bagaimana Indonesia Mengambil Momentum?. Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI.

"Why export restrictions should not be a response to COVID-19: Learning lessons from experience with rice in Asia and the Pacific." *Food and Agriculture Organization of the United Nations.*1 Juni 2020. http://www.fao.org/3/ca9362en/ca9362en.pdf (Diakses 30 September 2020).

Astuti, I. P., & Ayuningtyas, F. J. (2018). Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *19*(1),1–10.https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836

Ali, A., Khatoon, S., Ather, M., & Akhtar, N. (2015). Modeling Energy Consumption, Carbon Emission, and Economic Growth: Empirical Analysis for Pakistan. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 624-630.

Lai, A.A.L.M.F. and Bujang, I., 2016. The Heckscher-Ohlin versus Linder's Theory: Evidence from Malaysian exports. Journal of Business and Retail Management Research, 10(2).

Aprita,S.,&Adhitya,R.(2020).*Hukum Perdagangan Internasional* (R. Mirsawati (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.

Rinaldi, Jamal, S. (2017). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 4(1), 49–62.

Sedyaningrum, M., Suhadak, S., & Nuzula, N. (2016). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006:IV-2015:III. Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 34(1), 114–121.

Benny, Jimmy. 2013. Ekspor Impor dan Pengaruhnya Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.4 : 1406-1415

Ashraf, Q. H., Weil, D. N., & Wilde, J. (2011). *The Effect of Interventions to Reduce Fertility on Economic Growth* (No. 2011–14).

Acaravci, A., & Akalin, G. (2017). Environment-Economic Growth Nexus : A ComparativeAnalysis of Developed and Developing Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *7*(5), 34–43.

Zatira, D., Sari, T. N., & Apriani, M. D. (2021). Perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi-QU, 11(1), 88-96.

Dermawan, R. (2021). Perdagangan Internasional di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, 16(02).

Priangani, A., Mansyur, M., & Komarudin, E. (2021). Pandemi Covid 19 dan Menguatnya Proteksionisme. PROSIDING SENASPOLHI, 1(1).

Saragih, H., Rahayu, H., & Zulham, M. (2022). Kekuatan Ekonomi-politik China pasca Covid-19. Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs, 7(1), 1-32.

Mintarja, K., Parulian, R. T., & Alexander, S. C. (2020). Polemik Pembatasan dan Larangan Ekspor Global di Masa Pandemi COVID-19. Journal Unpar, 137-158.

Assiddiq, T. (2019). Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin Dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-2017. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 8(5), 425-432.

Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional. Millah: Jurnal Studi Agama, 85-98.

Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10(2), 8-14.

Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 10(2), 154-174.

Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, N. A. (2008). Perdagangan internasional, investasi asing, dan efisiensi perekonomian negara-negara ASEAN. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 10(3), 261-296.

Prasetya, M. A. W., Simorangkir, C., & Pribadi, D. M. A. (2022). Perdagangan Internasional Indonesia: Sebuah Komparasi di Masa Pandemi COVID-19. EXERO: Journal of Research in Business and Economics, 5(1), 82-111.